

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN

LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2024 - AUDITED

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Lubuk Kilang, Januari 2025
Ketua Pengguna Anggaran,

Kamaruddin, SH
NIP 19850101 201010 1 007



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN
Jl. Ahmad Yani No.13 A, Lubuk Sikaping, Kab. Pasaman
TELEPON 0753-20205, FAXIMILE 0753-321753
<https://kab-pasaman.kpu.go.id>

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 Audited sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Lubuk Sikaping, Januari 2025

Kuasa Pengguna Anggaran,

Kamaruddin, SH

NIP 19850101 201010 1 007



D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi	34
D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	35
D.11 Surplus Dari Kegiatan Non Operasional	35
D.12 Pos Luar Biasa	36
E. Penjelasan Atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	37
E.1 Ekuitas Awal	37
E.2 Surplus (Defisit) LO	37
E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset.....	37
E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan	37
E.3.3 Koreksi Selisih Revaluasi Aset Tetap	37
E.3.4 Koreksi Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi	38
E.3.5 Koreksi Lain-lain	38
E.4 Transaksi Antar Entitas.....	39
E.5 Ekuitas Akhir.....	39
F. Pengungkapan Penting Lainnya	43
F.1. Kejadian-Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca	43
F.2. Surat Keputusan Pengelola Keuangan Tahun 2024	44
F.3 Tuntutan Ganti Rugi	44
F.4 Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024.....	44
F.5 Reward Bank	46
Lampiran – lampiran	

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN
Jl. Ahmad Yani No.13 A, Lubuk Sikaping, Kab. Pasaman
TELEPON 0753-20205, FAXIMILE 0753-321753
<https://kab-pasaman.kpu.go.id>

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 Audited sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Lubuk Sikaping,

2025

Kuasa Pengguna Anggaran,


Kamaruddin, SH

NIP 19850101 201010 1 007

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Tahun 2024 - Audited ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024.

Nilai realisasi Pendapatan Tahun 2024 adalah Rp. 25.105.400,- dibanding tahun 2023 dimana realisasi sebesar Rp. 38.862.950,-.

Realisasi Belanja per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 59.589.970.382,- atau mencapai 97,19% dari Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 18.486.169.909,-.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2024. Nilai Aset per 31 Desember 2024 dicatat dan disajikan sebesar Rp 4.456.552.817,- yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp 3.327.630.472,-, Aset Tetap (neto) sebesar Rp1.104.300.379,- dan Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp 24.621.966,-.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp 1.077.549,- dan Rp 4.456.552.817,-.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/deficit dari operasi, surplus/deficit dari kegiatan non operasional, surplus/deficit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 0, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp.61.687.454.282,-, Surplus /Defisit dari kegiatan Operasional sebesar (Rp.61.687.454.282,- sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar (Rp.61.584.830.782,-).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2024 adalah sebesar Rp.11.611.534.474,- dikurangi Defisit-LO sebesar (Rp. 61.584.830.782,-) ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp 54.428.771.576,- sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2024 adalah senilai Rp 4.455.475.268,-.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2024 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2024 - AUDITED

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2024		% thd Angg	TA 2023
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	-	25.105.400	0,00	38.862.950
JUMLAH PENDAPATAN		-	25.105.400	0,00	38.862.950
BELANJA	B.2.				
Belanja Pegawai	B.3	2.875.203.000	2.973.725.576	103,43	2.864.025.834
Belanja Barang	B.4	15.668.962.000	56.567.844.806	361,02	15.497.399.235
Belanja Modal	B.5	127.200.000	48.400.000	38,05	124.744.840
Pinjaman dan Hibah	B.6	-	-	-	-
Belanja Barang	B.6.a	-	-	-	-
Belanja Modal	B.6.b	-	-	-	-
JUMLAH BELANJA		18.671.365.000	59.589.970.382	319,15	18.486.169.909

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN
NERACA
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2024	2023
ASET			
ASET LANCAR			
Kas lainnya dan setara kas	C.1	3.327.630.472	9.578.885.755
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	C.2	-	161.833.333
Persediaan	C.3	-	674.697.554
Jumlah Aset Lancar		3.327.630.472	10.415.416.642
ASET TETAP			
Tanah	C.4	415.483.968	415.483.968
Peralatan dan Mesin	C.5	2.388.604.158	2.257.703.158
Gedung dan Bangunan	C.6	412.582.000	412.582.000
Aset Tetap Lainnya	C.7	40.000.000	40.000.000
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.8	(2.152.369.747)	(1.957.613.871)
Jumlah Aset Tetap		1.104.300.379	1.168.155.255
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	C.9	24.745.695	29.408.595
Penyisihan Piutang Tak tertagih-Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	C.10	(123.729)	(147.043)
TAGIHAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/ TUNTUTAN GANTI RUGI	C.11	24.621.966	29.261.552
Jumlah Piutang Jangka Panjang		24.621.966	29.261.552
JUMLAH ASET		4.456.552.817	11.612.833.449
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.12	1.077.549	1.298.975
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		1.077.549	1.298.975
JUMLAH KEWAJIBAN		1.077.549	1.298.975
EKUITAS			
Ekuitas	C.13	4.455.475.268	11.611.534.474
JUMLAH EKUITAS		4.455.475.268	11.611.534.474
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		4.456.552.817	11.612.833.449

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 - AUDITED

URAIAN	CATATAN	2024	2023
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	-	-
JUMLAH PENDAPATAN		-	-
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	2.973.725.576	2.854.981.834
Beban Persediaan	D.3	3.483.033.870	17.127.000
Beban Barang dan Jasa	D.4	46.462.138.647	12.635.709.826
Beban Pemeliharaan	D.5	105.641.880	128.480.501
Beban Perjalanan Dinas	D.6	8.468.181.747	2.295.550.424
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7		
Beban Bantuan Sosial	D.8		
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	194.755.876	164.530.755
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih		(23.314)	147.043
JUMLAH BEBAN		61.687.454.282	18.096.527.383
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(61.687.454.282)	(18.096.527.383)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus Penjualan Aset Nonlancar	D.10	-	4.951.433
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		-	5.769.100
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		-	817.667
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		102.623.500	62.502.445
Beban dari kegiatan non Operasional lainnya		320.000	-
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		102.623.500	67.453.878
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(61.584.830.782)	(18.029.073.505)
POS LUAR BIASA	D.11		
Pendapatan PNBP			
Beban Perjalanan Dinas			
Beban Persediaan			
SURPLUS/DEFISIT LO		(61.584.830.782)	(18.029.073.505)

(Dalam Rupiah)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 DESEMBER 2024 - AUDITED**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2024	2023
EKUITAS AWAL	E.1	11.611.534.474	1.193.635.637
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(61.584.830.782)	(18.029.073.505)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3	-	-
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3.1		
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.2		
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.3	-	(224.200)
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.4	-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.3.5	-	-
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.6	-	-
JUMLAH		-	(224.200)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	54.428.771.576	4.194.262.604
EKUITAS AKHIR	E.5	4.455.475.268	(12.641.399.464)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman

Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Organisasi dan tata kerja entitas diatur dengan Peraturan Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan No. 2005/BALAP.071/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman yang berkedudukan di Jl. Ahmad Yani No.13 A Lubuk Sikaping.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman mempunyai tugas dan fungsi dalam memberikan bimbingan dan dukungan implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual pada Kementerian Negara/Lembaga. Melalui peran tersebut diharapkan kualitas laporan K/L dapat ditingkatkan yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan.

Untuk mewujudkan tujuan di atas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman berkomitmen dengan visi "Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia." Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam

menyelenggarakan Pemilihan Umum;

- Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab;
- Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersih, efisien dan efektif;
- Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan Pemilihan Umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2024 - Audited ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman. Laporan Keuangan ini dihasilkan berdasarkan data Aplikasi SAKTI dan Aplikasi MonSAKTI. Aplikasi SAKTI adalah aplikasi yang digunakan sebagai sarana bagi satker dalam mendukung implementasi SPAN untuk melakukan pengelolaan keuangan yang meliputi tahapan perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran. Aplikasi MonSAKTI adalah aplikasi yang digunakan untuk monitoring interkoneksi, rekonsiliasi dan penyusunan Laporan Keuangan. Pada Aplikasi MonSAKTI terdapat fitur yang mendukung pembuatan Laporan Keuangan Satker seperti To Do List, Monitoring, Rekonsiliasi, Laporan (LK dan LBMN) dan lainnya.

*Basis
Akuntansi*

A.3. Basis Akuntansi

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman menerapkan basis

akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar
Pengukuran*

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2024 – Audited ini telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik

spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman adalah sebagai berikut:

Pendapatan- LRA

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan- LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya

surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan

- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettoanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%

Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:

- a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (Satu juta rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (Dua puluh lima juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
 - Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola

Barang untuk dilakukan penghapusan

- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Piutang
Jangka
Panjang*

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset

Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, *Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman* telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal sebanyak 20 kali revisi. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan Tahapan Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja antara lain:

Uraian	2024	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Penerimaan Perpajakan	0	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	0	-
Hibah		
Jumlah Pendapatan	-	-
Belanja		
Belanja Pegawai	2.628.648.000	2.991.906.000
Belanja Barang	24.006.148.000	58.272.780.000
Belanja Modal		48.560.000
Pinjaman dan Hibah		
Belanja Barang		-
Belanja Modal		-
Jumlah Belanja	26.633.796.000	61.313.246.000

Realisasi
Pendapatan
Rp.25.105.400,-

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan KPU Kabupaten Pasaman sampai dengan periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 25.105.400,- merupakan setoran Tuntutan Ganti Rugi sebesar Rp. 25.105.400,- . Rincian realisasi pendapatan tahun 2024 dan 2023 sebagai berikut:

Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	NAIK (TURUN) %
Penerimaan Perpajakan	-	-	0,00
Penerimaan Negara bukan Pajak	25.105.400	38.862.950	2
Penerimaan Hibah		-	0,00
Jumlah	25.105.400	38.862.950	100,00

Realisasi Belanja
Negara

Rp.

59.589.970.382,-

B.2 Belanja

Realisasi Belanja pada TA 2024 adalah sebesar Rp. 59.589.970.382,- atau 97,19% dari anggaran belanja sebesar Rp. 61.313.246.000,-. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2024

Uraian	2024		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	2.981.906.000	2.973.725.576	99,39
Belanja Barang	58.272.780.000	56.567.844.806	97,07
Belanja Modal	48.560.000	48.400.000	-
Pinjaman dan Hibah	-	-	-
Total Belanja Kotor	61.313.246.000	59.589.970.382	97,19
Pembiayaan	-	-	-
Jumlah	61.313.246.000	59.589.970.382	97,19

Dibandingkan dengan TA 2023, Realisasi Belanja TA 2024 mengalami kenaikan hingga 222,35%, hal ini disebabkan karena Tahun anggaran 2024 merupakan tahapan Pemilu tahun 2024 dan pemilihan serentak nasional tahun 2024 sehingga realisasi meningkat drastis.

Perbandingan Realisasi Belanja TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI TA 2024	REALISASI TA 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	2.973.725.576	2.864.025.834	3,83
Belanja Barang	56.567.844.806	15.497.399.235	265,02
Belanja Modal	48.400.000	124.744.840	(61,20)
Pinjaman dan Hibah	-	-	-
Belanja Barang	-	-	-
Belanja Modal	-	-	-
Jumlah	59.589.970.382	18.486.169.909	222,35

Belanja Pegawai

Rp.

2.973.725.576,-

B.3 Belanja Pegawai

Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi Belanja Pegawai TA 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 2.973.725.576 dan Rp. 2.864.025.834 mengalami kenaikan sebesar 96,31 %.

Perbandingan Belanja Pegawai TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI		NAIK
	2024	2023	(TURUN)
			%
Belanja Gaji Pokok PNS	817.189.800	819.986.500	100,34
Belanja Pebulatan Gaji PNS	13.185	17.107	129,75
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	58.535.000	53.488.680	91,38
Belanja Tunj. Anak PNS	18.976.498	18.415.488	97,04
Belanja Tunj. Struktural PNS	45.000.000	47.340.000	105,20
Belanja Tunj. PPh PNS	5.246.039	876.892	16,72
Belanja Tunj. Beras PNS	47.435.100	50.766.420	107,02
Belanja Uang Makan PNS	93.379.000	145.587.000	155,91
Belanja Tunjangan Umum PNS	33.110.000	36.190.000	109,30
Belanja Uang Kehormatan Pejabat Negara	842.035.500	812.730.432	96,52
Belanja Gaji Pokok PPPK	57.664.800	0	0,00
Belanja Pebulatan Gaji PPPK	1.106	0	0,00
Belanja Tunj. Suami/Istri PPPK	5.766.480	0	0,00
Belanja Tunj. Anak PPPK	1.729.944	0	0,00
Belanja Tunj. Fungsional PPPK	9.720.000	0	0,00
Belanja Tunj. Beras PPPK	4.562.460	0	0,00
Belanja Uang Makan PPPK	7.548.000	0	0,00
Belanja Pegawai (Tunj. Khusus/Kegiatan/Kinerja)	873.121.468	879.258.315	100,70
Belanja Pegawai (Tunj. Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK)	60.405.800	0	0,00
Jumlah Belanja Kantor	2.981.440.180	2.864.656.834	96,08
Pengembalian beban Pembulatan Gaji PNS	7.714.604	631.000	8,18
Pengembalian beban pegawai (tunj. Khusus kegiatan)	0	0	
Jumlah Belanja	2.973.725.576	2.864.025.834	96,31

Belanja Barang
Rp56.567.844.806

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang TA 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 56.567.844.806 dan Rp. 15.497.968.545. Realisasi Belanja Barang TA 2024 mengalami kenaikan 265% dari Realisasi Belanja Barang TA 2023. Hal ini disebabkan karena adanya belanja keperluan badan adhoc untuk Pemilu (PSU DPD) dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, berupa belanja honorarium dan Operasional Badan Adhoc serta meningkatnya kegiatan diluar kantor sehingga membuat belanja perjalanan dinas juga meningkat.

Perbandingan Belanja Barang TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI TA 2023	REALISASI TA 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang	189.628.900	183.287.200	(1,88)
Belanja Barang Non Operasional	42.713.791.020	12.228.573.943	
Belanja Jasa	3.464.411.794	375.498.516	
Belanja Pemeliharaan	105.841.880	128.200.501	(17,80)
Belanja Perjalanan Dinas	8.408.181.747	2.290.119.734	268,80
Belanja Barang Persediaan	1.693.715.865	278.288.851	-
Jumlah Belanja Kotor	56.636.359.206	15.437.968.545	265,44
Pengembalian Belanja	87.524.400	-	-
Jumlah Belanja	56.567.844.806	15.437.968.545	268,00

Belanja Modal Rp
48.400.000,-

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal TA 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 48.400.000 dan Rp. 124.744.840,-. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi untuk keperluan Tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	48.400.000	124.744.840	100,00
Jumlah Belanja Kotor	48.400.000	124.744.840	0,00
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	48.400.000	124.744.840	199,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin berupa Pengadaan Laptop Merk ASUS ExpertBook B1402CBA_ID I7/8GB/512GB SSD sebanyak 2 unit total seharga Rp. 48.400.000,-.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

*Kas Lainnya
dan Setara Kas
Rp.3.327.630.4
72,-*

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 3.327.630.472,- dan Rp. 9.578.885.755,-. Kas lainnya dan setara kas sampai pada akhir periode tahun anggaran 2024 adalah Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024 yang telah di hibahkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman sebesar Rp. 23.944.463.200,- dan KPU Kabupaten Pasaman telah menggunakan sebesar Rp. 20. 617.726.777,- sehingga sisa dana hibah menjadi sebesar Rp. 3.326.736.423,- dan Bagi Hasil Rekening Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Bulan Desember 2024 sebesar Rp. 894.049,- karena bagi hasil baru akan disetor pada Januari 2024 ke Kas Daerah. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran TA 2024 dan 2023

Keterangan	TH 2024	TH 2023
RPL 091 PDHL KPU PSMAK UTK 2Y3PCAHA	3.326.736.423	9.577.770.280
BAGI HASIL	894.049	1.115.475
Jumlah	3.327.630.472	9.577.770.280

*Belanja Dibayar
muka (prepaid)
Rp.0,-*

C.2 Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)

Nilai Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) per Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 161.833.333,-. KPU Kabupaten Pasaman sampai akhir periode yang berakhir 31 Desember 2024 tidak memiliki Belanja dibayar dimuka karena untuk sewa gudang logistic KPU Pasaman menggunakan dana Sharing dari KPU Provinsi Sumatera Barat. Rincian Belanja dibayar dimuka (Prepaid) adalah sebagai berikut:

Gudang	Nominal	2024	Bayar Dimuka
Gudang Logistik 1	-	-	-
Gudang Dinkes	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Persediaan Rp
0,-

C.3 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 674.674.554,-. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2024 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan TA 2024 dan 2023

Jenis	TH 2024	TH 2023
Persediaan	-	674.697.554
Jumlah	-	674.697.554

Tanah
Rp415.483.968,

C.4 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp415.483.968 dan Rp415.483.968. Tidak mengalami perubahan dari Tahun sebelumnya karena KPU Kabupaten Pasaman tidak melakukan penambahan asset tanah.

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	415.483.968
Mutasi tambah:	0
Pembelian	0
Mutasi kurang:	
Revaluasi aset	-
Penyitaan pengadilan	0
Saldo per 31 Desember 2024	415.483.968

Peralatan dan
Mesin

Rp2.388.604.158,

C.5 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp. 2.388.604.158,- dan Rp 2.257.703.158,-. Terdapat Mutasi penambahan nilai Peralatan dan Mesin yang dapat dilihat pada table berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	2.257.703.158
Mutasi tambah:	
Pembelian	130.901.000
Hibah Barang	0
Transfer Masuk	0
Koreksi tambah	0
Mutasi kurang:	0
Penghentian dari penggunaan	-
Saldo per 31 Desember 2024	2.388.604.158
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	-2.071.996.627
Nilai Buku per 31 Desember 2024	316.607.531

Gedung dan
Bangunan

Rp412.582.000

C.6 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp412.582.000 dan Rp412.582.000. Tidak adanya mutasi tambah pada Tahun 2024 yang terlihat pada rincian sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	412.582.000
Mutasi tambah:	-
Mutasi kurang:	-
Saldo per 31 Desember 2024	412.582.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	(80.373.120)
Nilai Buku per 31 Desember 2024	332.208.880

**Aset Tetap
Lainnya**

Rp.40.000.000

C.7 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp.40.000.000 dan Rp.40.000.000. Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

**Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap (Rp
2.152.369.747,-)**

C.8 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing Rp. 2.152.369.747,- dan Rp. 1.957.613.871,-. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

*Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
TA 2024*

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	2.388.804.158	2.071.996.627	316.807.531
2	Gedung dan Bangunan	412.582.000	80.373.120	332.208.880
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan			0
4	Aset Tetap Lainnya			0
Akumulasi Penyusutan		2.801.186.158	2.152.369.747	648.816.411

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

**Piutang TGR Rp
24.745.695,-**

C9. Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Saldo Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan

ganti Rugi periode 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 24.745.695,-. Ini merupakan Tagihan Tuntutan Ganti Rugi yang masih harus dibayar.'

*Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih (Rp.
123.729,-)*

**C10. Penyisihan Piutang Tak Tertagih- Tuntutan
Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi**

Saldo Penyisihan Piutang Tak tertagih- Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar (Rp 123.729)

*TGR Rp
24.621.966,-*

**C11. Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti
Rugi**

Saldo Tagihan Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan ganti Rugi periode 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 24.621.966,-. Ini merupakan Tagihan Tuntutan Ganti Rugi yang masih harus dibayar.'

*Utang kepada
Pihak Ketiga
Rp. 1.077.549,-*

C.12 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp. 1.077.549,- dan Rp. 1.298.975. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar berupa Bagi hasil dana Hibah Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Pasaman tahun 2024 bulan Desember 2024 sebesar Rp. 894.049 dan Tagihan Air PDAM Kantor KPU Kabupaten Pasaman Bulan Desember 2024 sebesar Rp. 183.500,-. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

Uraian	Jumlah
Bagi Hasil per 31 Desember 2024	894.049
Tagihan Air PDAM Bulan Desember 2023	183.500
Total	1.077.549

Ekuitas

Rp.

4.455.475.268,-

C.12 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 4.455.475.268,- dan Rp. 11.611.534.474. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Pendapatan

PNBP

Rp 0,-

D.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Tidak adanya mutasi nilai Pendapatan sampai pada tanggal laporan yang dapat dilihat pada table berikut:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak TA 2024 dan 2023

URAIAN	TH 2024	TH 2023	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Jasa	0	0	0
Pendapatan Lain-lain	0	0	0
Jumlah	0	0	0

Beban Pegawai

Rp.

2.973.725.576,-

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 2.973.725.576 dan Rp. 2.854.981.834,- Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai TA 2024 dan 2023

Pengembalian Beban Tunj. Beras PNS	(289.680)		
Beban Uang Makan PNS	93.379.000	136.543.000	
Beban Pengembalian Uang Makan PNS	(4.509.000)	(631.000)	
Beban Tunjangan Umum PNS	33.110.000	36.190.000	
Pengembalian Beban Tunjangan Umum PNS	(180.792)		
Beban Uang Kehormatan Pejabat Negara	842.035.500	812.730.500	
Beban Gaji Pokok PPPK	57.664.800		
Beban Pembulatan Gaji PPPK	1.106		
Beban Tunj. Suami/Istri PPPK	5.766.480		
Beban Tunj. Anak PPPK	1.729.944		
Beban Tunjangan Fungsional PPPK	9.720.000		
Beban Tunjangan Beras PPPK	4.562.480		
Beban Uang Makan PPPK	7.548.000		
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	873.121.468	879.258.315	
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja) PPPK	60.405.800		
Jumlah	2.973.725.576	2.854.981.834	

*Beban
Persediaan Rp
3.483.033.870,-*

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 3.483.033.870,- dan Rp. 17.127.000,-. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan TA 2024 dan 2023

URAIAN	TH 2023	TH 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	0	17.127.000	-100
Beban Persediaan bahan baku	3.483.033.870	-	#DIV/0!
Beban Persediaan Lainnya	-	342.188.448	0
Jumlah	3.483.033.870	359.315.448	969

Beban Barang

D.4 Beban Barang dan Jasa

dan Jasa Rp
46.462.138.647,-

Jumlah Beban Barang dan Jasa Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 46.462.138.647,- dan Rp. 12.635.709.826,-. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Kenaikan Beban Barang dan Jasa untuk Tahun 2024 dan 2023 dapat dilihat pada Table berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2024	TH 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Keperluan Perkantoran	33.955.600	37.356.200	(9,10)
Beban Pengiriman Surat Dinas		91.000	(100,00)
Pengembalian Beban Honor Operasional Satuan Kerja	-4.284.400		
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	81.642.000	130.740.000	(103,28)
Beban barang operasional lainnya	74.029.300	25.100.000	225,27
Pengembalian Beban Bahan	-46.740.000		
Beban Peralatan dan Mesin -Ekstrakomplebel	950.000		#DIV/0!
beban bahan	5.421.896.100	1.141.772.188	374,87
beban honor output kegiatan	29.434.598.000	9.492.550.000	210,08
Beban Barang Non Operasional Lainnya	7.856.356.020	1.594.251.755	392,79
Pengembalian Beban Barang Non Operasional Lainnya	-16.500.000		
Beban Langganan Listrik	13.096.620	11.004.280	0,00
Beban Langganan Telepon	7.126.388	6.407.260	
Beban Langganan Air	2.858.500	2.226.800	
Beban Sewa	456.153.333	97.416.667	
beban jasa Profesi	76.700.000	15.410.000	410,71
Beban Jasa Lainnya	3.068.400.286	81.353.696	
Beban Aset Ekstrakomplebel Peralatan dan Mesin			
Jumlah	46.462.138.647	12.635.709.826	267,71

Beban
Pemeliharaan
Rp.105.641.880

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 105.641.880,- dan Rp. 128.480.501,-. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai

berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2023	TH 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	54.433.100	39.766.000	0,48
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	51.208.780	91.434.501	(43,99)
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan		280.000	(100,00)
Jumlah	105.641.880	129.480.501	(17,78)

*Beban
Perjalanan
Dinas
Rp8.468.181.747,-*

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 8.468.181.747,- dan Rp. 2.295.550.424,-. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Kenaikan beban perjalanan dinas disebabkan oleh frekuensi kegiatan Tahapan Pemilu yang telah mulai sejak bulan Juni tahun 2022. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2023	TH 2023	NAIK (TURUN)
Beban Perjalanan Biasa	2.315.547.092	1.163.970.983	98,94
Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Biasa		-589.310	
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.414.667.750	449.119.751	437,64
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	2.383.220.905	262.950.000	0,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1.354.746.000	420.079.000	0,00
Jumlah	8.468.181.747	2.295.550.424	269,90

*Beban Barang
untuk
Diserahkan
kepada
Masyarakat*

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Rp0

merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas.

*Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat
TA 2024 dan 2023*

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2024	TH 2023	NAIK (TURUN) %
Persediaan untuk diserahkan kepada Masyarakat	0	0	0%
Belanja Modal BLU	0	0	0%

*Beban Bantuan
Sosial Rp0*

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Rincian Beban Bantuan Sosial untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Bantuan Sosial TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2024	TH 2023	% NAIK (TURUN)
Beban Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial	0	0	0,00
Beban Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial	0	0	0,00
Beban Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial	0	0	0,00
Jumlah	0	0	0,00

*Beban
Penyusutan dan
Amortisasi
Rp194.755.876,*

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 194.755.876,- dan Rp. 164.530.755,-. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable*

assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
TA 2024 dan
2023*

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	TH 2024	TH 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	184.039.460	153.814.339	19,65
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	10.716.416	10.716.416	0
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, Jaringan			
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya			
Jumlah Penyusutan	194.755.876	164.530.755	18,37
Beban Amortisasi Software			
Beban Penyusutan aset lain-lain			
Jumlah Amortisasi	-	-	
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	194.755.876	164.530.755	18,37

*Beban
Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih (Rp.
23.314,-)*

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih tahun 2024 dan 2023 adalah (Rp. 23.314,-) dan Rp. 147.043,-. Beban penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa yang akan datang.

*Surplus dari
kegiatan non
Operasional
Rp61.687.454.2
82,-*

D.11 Surplus Dari Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus dari kegiatan non operasional untuk tahun 2023 dan Tahun 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 61.687.454.282,- dan Rp. 18.096.527.383,-. Perbandingan nilai Surplus dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional TA 2024 dan 2023

URAIAN	TH 2024	TH 2023	(T
Surplus Pelepasan Aset Non Lancar		4.951.433	
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		0	
Beban dari kegiatan non operasional lainnya		0	
Surplus/defisit dari kegiatan Non Operasional Lainnya		67.453.879	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	102.943.500		
Beban dari kegiatan non operasional lainnya	320.000	0	
Jumlah Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional	102.623.500		
Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa	-61.584.800.782	-18.029.073.505	
Surplus dari kegiatan non operasional	61.687.454.282	18.096.627.383	

**)Pendapatan/BebanPenyesuaian Nilai Persediaan timbul karena kebijakan penilaian persediaan menggunakan metode Harga Perolehan Terakhir. Akun ini tidak akan muncul ketika penilaian persediaan menggunakan metode First In First Out (FIFO)*

*Pos Luar Biasa
Rp0*

D.12 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Pos Luar Biasa TA 2024 dan 2023

URAIAN	TH 2024	TH 2023	NABK (TURUN) %
Pendapatan PNB	0	0	
Beban Perjanjian Dinas	0	0	
Beban Persediaan	0	0	
Jumlah	0	0	0,00

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal

Rp11.611.534,47

4,-

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 11.611.534.474,- dan Rp. 1.193.635.637,-.

Defisit LO

-Rp

61.584.830,782,-

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar (Rp. 61.584.830.782,-) dan Rp. 18.029.073.505,-. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Penyesuaian Nilai Aset

Rp0

E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai

Persediaan Rp0,-

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan (Rp224.200,-). Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Persediaan

Jenis Persediaan	Koreksi
Barang Konsumsi	-
Suku Cadang	-
Jumlah	-

Selisih Revaluasi
Aset Tetap Rp0

E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Hal ini dikarenakan tidak adanya penyesuaian penilaian aset tetap.

Koreksi Aset Tetap
Non Revaluasi
Rp0

E.3.4 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar – Rp0 dan Rp0,-. Rincian Koreksi Aset Tetap non Revaluasi Tahun 2024 dapat dilihat sebagai berikut:

Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Tahun 2024 dan 2023

Jenis Aset Tetap	TH 2024	TH 2023	Naik/Turun %
Peralatan dan Mesin	Rp -	Rp -	0%
Gedung dan Bangunan	Rp -	Rp -	-
Jumlah	Rp -	Rp -	-

Koreksi Lain-Lain
Rp. 0,-

E.3.5 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp. 0 dan Rp0.

Transaksi Antar
Entitas Rp.
54.428.771.576,-

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 54.428.771.578,- dan Rp. Rp. 28.447.196.542,-. Transaksi

antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	-
Ditagihkan ke Entitas Lain	54.428.771.576
Transfer Masuk	-
Transfer Keluar	-
Pengesahan Hibah Langsung	-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
Jumlah	54.428.771.576

Ekuitas Akhir

Rp.4.455.475.268

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 4.455.475.268,- dan Rp. 11.611.534.474,-.

F.PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Sampai pada periode neraca KPU Kabupaten Pasaman memiliki Utang pada pihak ketiga sebesar Rp. 1.077.549,- yang merupakan:

1. Bagi Hasil Bulan Desember 2024 Rekening RPL 091 PDHL KPU PSMN sebesar Rp. 894.049,- (Delapan ratus Sembilan puluh empat ribu empat puluh Sembilan rupiah) yang baru setor oleh Bendahara Pengeluaran KPU Kabupaten Pasaman pada tanggal 8 Januari 2025 ke Kas Daerah Kabupaten Pasaman, bukti terlampir;
2. Tagihan Air PDAM Kantor KPU Kabupaten Pasaman Bulan Desember 2024 sebesar Rp. 183.500 (*Seratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah*) yang dibayar pada tanggal 21 Januari 2025

F.2 SURAT KEPUTUSAN PENGELOLA KEUANGAN TAHUN 2024

Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris KPU Kab. Pasaman Nomor: 1 Tahun 2024 tanggal 2 Januari 2024 tentang Penunjukkan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan Surat Perintah Bayar, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Staf Pengelola Keuangan serta Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2024 Adalah Sebagai berikut :

Pejabat Pembuat Komitmen	:	AHDI FITRA NUGRAHA, SH
Pejabat Penandatanganan SPM	:	IRWAN AP, SH
Bendahara	:	Muhammad Irvan, S. IP

Pengeluaran

Staf Pengelola Keuangan : 1. Zona Travalina, A. Md
2. Ratih, S. IP

Pejabat Pengadaan : Yorbalinda, SH
Barang dan Jasa

F.3 TUNTUTAN GANTI RUGI (TGR)

Jumlah SKTJM KPU Kabupaten Pasaman yang telah direkam diaplikasi SAKTI sebesar Rp. 82. 944.945,- sampai pada periode neraca KPU Kabupaten Pasaman telah menyetorkan TGR sebesar Rp. 58.199.250,- (untuk total tahun 2023 smpai tahun 2024). Dengan demikian jumlah TGR yang masih harus di setor ke Kas Negara adalah sebesar Rp. 24.745.695,-.

F.4 HIBAH PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN TAHUN 2024

a. NPHD

Untuk Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil bupati Pasaman tahun 2024 KPU Kabupaten Pasaman Menerima Hibah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman sebesar Rp. 23.944.488.200,- (Dua puluh tiga milyar Sembilan ratus empat puluh empat juta empat ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus rupiah) yang tercantum pada NPHD nomor 271.8/362/KESBANGPOL/2023 dan Nomor 728/PP.01.2-NK/1308/2023 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman tahun 2024 tanggal 10 November 2023.

b. Register Hibah

Pada tanggal 16 November 2023 KPU Kabupaten Pasaman telah mengirimkan surat permohonan Penerbitan Nomor Register Hibah kepada Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumater Barat. Tanggal 21

November 2023 Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat mengirimkan surat Penetapan Penerbitan Nomor Register Hibah Satker 076.656176 TA 2023 dengan nomor register 2Y3PCAHA senilai Rp. 23.944.488.200,-.

c. Pembukaan Rekening

Setelah mendapatkan Nomor Register Hibah, KPU Kabupaten Pasaman melakukan permohonan persetujuan pembukaan rekening kepada Kepala KPPN Lubuk Sikaping. Dan pada tanggal 24 November 2023 Kepala KPPN Lubuk Sikaping telah menerbitkan Surat Nomor S-568/KPN.0304/2023 perihal Persetujuan Pembukaan Rekening Lainnya Atas Nama KPU KABUPATEN PASAMAN. Sesuai surat tersebut Rekening Hibah di beri nama RPL 091 PDHL KPU KAB PASAMAN UNTUK 2Y3PCAHA pada Bank BSI Capem Lubuk Sikaping. Setelah melakukan pembukaan rekening Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman pada tanggal 15 Desember 2023 melakukan transfer tahap 1 sebesar Rp. 9.577.770.280,-

d. Pengesahan

Pada tanggal KPU Kabupaten Pasaman telah melakukan pengesahan sebanyak 3 kali dengan rincian sebagai berikut:

1. SP2HL untuk Pendapatan hibah sebesar Rp. 9.577.770.280,- dengan Nomor SP2HL 00197 A tanggal 31 Desember 2023 dan SPHL Nomor 00197T/656176/2023f tanggal 31 Desember 2023;
2. SP2HL nomor 00221T/656176/2024 tanggal 11 Desember 2024 untuk Pendapatan tahap 2 dan Belanja sebesar Rp. 14.366.692.920 untuk Pendapatan Rp. 7.110.595.620,- untuk Belanja Hibah dari Bulan Mei sampai dengan Oktober 2024. Dengan SPHL Nomor 240910000000005 tanggal 12 Desember 2024
3. SP2HL nomor 00232T/656176/2024 tanggal 31 Desember 2024 untuk Belanja Hibah dari Bulan November dan

Desember 2024. Dengan SPHL Nomor 240910600030001 tanggal 31 Desember 2024

e. Realisasi Belanja Hibah

Sampai tanggal Neraca 31 Desember 2024 KPU Kabupaten Pasaman telah menggunakan Dana Hibah untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024 sebesar Rp. 20.617.726.777,- dengan lampiran Realisasi Anggaran Dana Hibah Tahun 2024 terlampir.

F.5 REWARD BANK

Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antara KPU Kabupaten Pasaman dengan PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk tentang Penyimpanan, Pendistribusian dan Penyaluran Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024 Nomor 241.A/PP.01.2-PKS/1308/2024 dan Nomor 03/864-3/465 tanggal 19 April 2024 pada pasal 3 point d tentang Hak dan Kewajiban menjelaskan "Mendapatkan fasilitas lainnya dari PIHAK KEDUA berupa barang sarana dan prasarana kantor lainnya senilai 1 % (satu persen) dari total besaran dana hibah sesuai NPHD nomor 728/PP.01.2-NK/1308/2023 yang telah ditempatkan pada PIHAK KEDUA. Sehingga KPU Kabupaten Pasaman sampai tanggal neraca telah menerima fasilitas kantor senilai Rp. 87.252.000,- sesuai BAST Barang Reward nomor 03/864-3/465 dan Nomor 130.i/BAST/1308/VII/2024 tanggal 20 Juli 2024. Namun KPU Kabupaten Pasaman hanya dapat mencatat pada Aplikasi SAKTI Modul Persediaan sebesar Rp. 82.501.000,- sedangkan sisanya sebesar Rp. 4.751.000,- tidak dapat dicatat dikarenakan tidak tersedianya kode barang pada aplikasi SAKTI Modul Aset. Rincian Barang Reward dapat dilihat sebagai berikut:

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (076) KOMISI PEMILIHAN UMUM
 ESELON I : (01) KOMISI PEMILIHAN UMUM
 WILAYAH/PROVINSI : (0000) SUMATERA BARAT
 SATUAN KERJA : (656176) KPU KABUPATEN PASAMAN

Tgl Data : 09/05/25 8:11 AM
 Tgl Cetak : 09/05/25 2:17 PM
 Halaman : 1
 lap_lo_satker_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	0	0	0	
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	0	0	0	
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	2,973,725,576	2,854,981,834	118,743,742	4.159
Beban Persediaan	3,483,033,870	17,127,000	3,465,906,870	20.236.509
Beban Barang dan Jasa	46,462,138,647	12,635,709,826	33,826,428,821	267.705
Beban Pemeliharaan	105,641,880	128,480,501	(22,838,621)	(17.776)
Beban Perjalanan Dinas	8,468,181,747	2,295,550,424	6,172,631,323	268.896
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (076) KOMISI PEMILIHAN UMUM
 ESELON I : (01) KOMISI PEMILIHAN UMUM
 WILAYAH/PROVINSI : (0800) SUMATERA BARAT
 SATUAN KERJA : (656176) KPU KABUPATEN PASAMAN

Tgl Data : 09/05/25 8:11 AM
 Tgl Cetak : 09/05/25 2:17 PM
 Halaman : 2
 lap_lo_satker_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	194,755,876	164,530,755	30,225,121	18.37
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(23,314)	147,043	(170,357)	(115.85 5)
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	61,687,454,282	18,096,527,383	43,590,926,899	240.88
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(61,687,454,282)	(18,096,527,383)	(43,590,926,899)	240.88
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	0	4,951,433	(4,951,433)	(100)
Pendapatan Pelepasan Aset	0	5,769,100	(5,769,100)	(100)
Beban Pelepasan Aset	0	817,667	(817,667)	(100)
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	102,623,500	62,502,445	40,121,055	64.191
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	102,943,500	62,502,445	40,441,055	64.703
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	320,000	0	320,000	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	102,623,500	67,453,878	35,169,622	52.139
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(61,584,830,782)	(18,029,073,505)	(43,555,757,277)	241.586
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(61,584,830,782)	(18,029,073,505)	(43,555,757,277)	241.586

Keterangan :

FINAL

PASAMAN 9 Mei 2025
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGABAN

KAMARUDDIN
NIP. 198501042040121007



LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (076) KOMISI PEMILIHAN UMUM
UNIT ORGANISASI : (01) KOMISI PEMILIHAN UMUM
WILAYAH/PROVINSI : (0800) SUMATERA BARAT
SATUAN KERJA : (656176) KPU KABUPATEN PASAMAN

Tgl Data : 09/05/25 1:24 PM

Tgl Cetak : 09/05/25 3:30 PM

Halaman : 1

lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	11,611,534,474	1,193,635,637	10,417,898,837	872.79
SURPLUS/DEFISIT-LO	(61,584,830,782)	(18,029,073,505)	(43,555,757,277)	241.59
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	0	(224,200)	224,200	(100)
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0	(224,200)	224,200	(100)
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	0	0	0	0
LAIN-LAIN	0	0	0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	54,426,771,576	28,447,196,542	25,981,575,034	91.33
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(7,156,059,206)	10,417,898,837	(17,573,958,043)	(168.69)
EKUITAS AKHIR	4,455,475,268	11,611,534,474	(7,156,059,206)	(61.63)

Keterangan :

FINAL

PASAMAN, 9 Mei 2025
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

KAMARUDDIN
NIP. 199501612010121007

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KOMISI PEMILIHAN UMUM 076
ESELON I : KOMISI PEMILIHAN UMUM 01
SATUAN KERJA : KPU KABUPATEN PASAMAN 656176

Tgl Data : 09/05/25 8:11 AM
Tgl Cetak : 09/05/25 2:15 PM
Halaman : 2
lap_ira_face_satker_new_poc

URAIAN	2024				2023			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	61,313,246,000	59,589,970,382	(1,723,275,618)	97.19	18,671,365,000	18,486,169,909	(185,195,091)	99.01
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

FINAL

PASAMAN, 04 Mei 2025
Penanggung Jawab LIAK/PA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

KAMARUDDIN
NIP. 196501042010121007

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KOMISI PEMILIHAN UMUM 076
ESELON I : KOMISI PEMILIHAN UMUM 01
SATUAN KERJA : KPU KABUPATEN PASAMAN 656176

Tgl Data : 09/05/25 8:11 AM
Tgl Cetak : 09/05/25 2:15 PM
Halaman : 1
lap_tra_face_satker_new_poc

URAIAN	2024				2023			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	0	25,105,400	25,105,400	0	0	38,862,950	38,862,950	0
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	0	25,105,400	25,105,400	0	0	38,862,950	38,862,950	0
III. Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	0	25,105,400	25,105,400	0	0	38,862,950	38,862,950	0
B. Belanja Negara	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belanja Pemerintah Pusat	61,313,246,000	59,589,970,382	(1,723,275,618)	97.19	18,671,365,000	18,486,189,909	(185,195,091)	99.01
1. Belanja Pegawai	2,991,908,000	2,973,725,576	(18,182,424)	99.39	2,875,203,000	2,864,025,834	(11,177,166)	99.61
2. Belanja Barang	56,272,780,000	56,567,844,806	(1,704,935,194)	97.07	15,668,962,000	15,497,399,235	(171,562,765)	98.91
3. Belanja Modal	48,580,000	48,400,000	(180,000)	99.67	127,200,000	124,744,840	(2,455,160)	98.07
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (076) KOMISI PEMILIHAN UMUM
 UNIT ORGANISASI : (01) KOMISI PEMILIHAN UMUM
 WILAYAH/PROVINSI : (0800) SUMATERA BARAT
 SATUAN KERJA : (656176) KPU KABUPATEN PASAMAN

Tgl Data : 09/05/25 8:11 AM
 Tgl Cetak : 09/05/25 1:56 PM
 Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2024	2023	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas Lainnya dan Setara Kas	3,327,630,472	9,578,885,755	(6,251,255,283)	(65.26)
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	0	161,833,333	(161,833,333)	(100.00)
Persediaan	0	674,697,554	(674,697,554)	(100.00)
JUMLAH ASET LANCAR	3,327,630,472	10,415,416,642	(7,087,786,170)	(68.05)
ASET TETAP				
Tanah	415,483,968	415,483,968	0	0.00
Peralatan dan Mesin	2,388,604,158	2,257,703,158	130,901,000	5.80
Gedung dan Bangunan	412,582,000	412,582,000	0	0.00
Aset Tetap Lainnya	40,000,000	40,000,000	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(2,152,369,747)	(1,957,613,871)	(194,755,876)	9.95
JUMLAH ASET TETAP	1,104,300,379	1,168,155,255	(63,854,876)	(5.47)
PIUTANG JANGKA PANJANG				
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	24,745,695	29,408,595	(4,662,900)	(15.86)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	(123,729)	(147,043)	23,314	(15.86)
TAGIHAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/TUNTUTAN GANTI RUGI (NETTO)	24,621,966	29,261,552	(4,639,586)	(15.86)
JUMLAH PIUTANG JANGKA PANJANG	24,621,966	29,261,552	(4,639,586)	(15.86)
JUMLAH ASET	4,456,552,817	11,612,833,449	(7,156,280,632)	(61.62)
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	1,077,549	1,298,975	(221,426)	(17.05)
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	1,077,549	1,298,975	(221,426)	(17.05)
JUMLAH KEWAJIBAN	1,077,549	1,298,975	(221,426)	(17.05)
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	4,455,475,268	11,611,534,474	(7,156,059,206)	(61.63)
JUMLAH EKUITAS	4,455,475,268	11,611,534,474	(7,156,059,206)	(61.63)
JUMLAH EKUITAS	4,455,475,268	11,611,534,474	(7,156,059,206)	(61.63)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	4,456,552,817	11,612,833,449	(7,156,280,632)	(61.62)

NERACA

TINGKAT SATUAN KERJA PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED (DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (076) KOMISI PEMILIHAN UMUM
UNIT ORGANISASI : (01) KOMISI PEMILIHAN UMUM
WILAYAH/PROVINSI : (0800) SUMATERA BARAT
SATUAN KERJA : (656176) KPU KABUPATEN PASAMAN

Tgl Data : 09/05/25 8:11 AM

Tgl Cetak : 09/05/25 1:56 PM

Halaman : 2

lap_neraca_satker_komparatif_poc

Keterangan :

FINAL

PASAMAN, 11 Mei 2025

Perangung Jawab UAK

KUASA PENGGUNA ANGGARAN



HamARUDIN

NIP. 19850101201012007